

PENGARUH KRISIS EKONOMI GLOBAL TERHADAP EKONOMI DI INDONESIA

TITA DEITIANA

STIE Trisakti
tita@stietrisakti.ac.id

Abstract : *Efforts to combat the global economic crisis of the nation Indonesia should be more careful in accepting foreign products coming into the country, especially during this time more people favor foreign products this does not add to the economy in Indonesia, but the economic down turn. Indonesia's dependence on International Monetary Fund debt problems and make more and more difficult to cover other debts. The Indonesian people pay more attention to small businesses that exist in order to be able to decrease unemployment.*

Keywords : Global economic crisis, economy, International Monetary Fund, Indonesia

Abstrak : Upaya untuk penanggulangan krisis ekonomi global bangsa Indonesia harus lebih teliti dalam menerima produk-produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri, apalagi selama ini orang-orang lebih mengunggulkan produk luar negeri, hal ini tidak menambah perekonomian di Indonesia melainkan kemerosotan ekonomi. Ketergantungan Indonesia terhadap hutang *International Monetary Fund* membuat makin banyak permasalahan dan sulit untuk menutupi hutang-hutang yang lain. Bangsa Indonesia lebih memperhatikan usaha-usaha kecil yang ada agar pengangguran lebih bisa berkurang.

Kata kunci : Krisis ekonomi global, ekonomi, *International Monetary Fund*, Indonesia

PENDAHULUAN

Ekonomi tidak selamanya terus menerus berkembang dengan baik, bahkan dalam tahun ini perekonomian bukan tambah berkembang akan tetapi perekonomian dunia tambah merosot. Hal ini disebabkan kebutuhan pokok yang semakin mahal dan harga minyak dunia yang sempat memaksa berbagai sektor produksi ekonomi menaikkan ongkos produksinya dan tidak terkoreksi hingga hari ini meskipun harga

minyak dunia sekarang turun. Sedangkan disisi lain adanya suatu dari imbasnya pemanasan global yang telah menyerang lingkungan hidup bumi manusia, dengan cuaca buruk, gelombang badai, banjir, tanah longsor, telah memukul hampir semua produksi pertanian dan kelancaran sistem transportasi dunia. banyaknya permasalahan yang ada maka hampir seluruh dunia perekonomian memburuk dengan begitu adanya krisis ekonomi global.

Dengan adanya krisis global banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja (PHK) baik di Indonesia maupun di luar negeri dikarenakan permintaan produk dalam negeri oleh pihak konsumen luar negeri yang menurun dan juga perusahaan memangkas biaya produksi. Dan juga akibat orientasi ekspor produk yang terlalu bertumpu pada pasar Amerika bahkan ekspor Indonesia ke negara Amerika menduduki peringkat kedua terbesar setelah Jepang maka mengakibatkan hantaman telak bagi Indonesia karena daya beli konsumsi Amerika akan merosot akibat krisis finansial yang menerpanya. Bagi Indonesia, krisis ini akan memiliki dampak yang saling terkait diberbagai sektor. Pada akhirnya, semua ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dari latar belakang diatas dapat kita ambil satu hal pokok yang akan kita bahas dalam paper ini, yaitu bagaimana cara menghadapi krisis ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia? Manfaat penelitian ini adalah (1) Indonesia terhindar dari krisis ekonomi global khususnya negara Amerika, (2) Indonesia tidak adanya ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap ekonomi didunia; (3) Ekspor Indonesia tidak bertumpu pada Amerika saja, melainkan pada negara yang lain.

Krisis Global dan Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa faktor kenaikan harga-harga kebutuhan pokok memang tidak bisa dipisahkan dengan faktor resesi ekonomi dunia yang kian memburuk seiring dengan krisis umum imrealisme kelesuan ekonomi Amerika Serikat yang dipicu oleh krisis kredit perumahan (*sub-prime mortgage*); krisis finansial, krisis energi minyak, gas, batubara, ditandai dengan kenaikan harga minyak di pasaran internasional yang telah menembus 117 US\$/barel, namun terkoreksi pada angka 82 US\$/barel pada bulan Oktober tahun 2008 akibat permintaan terhadap minyak dunia menurun impas dari krisis yang terjadi di Amerika. Walaupun demikian harga minyak dunia yang sempat melambung memaksa berbagai sektor produksi ekonomi menaikkan

ongkos produksinya dan tidak ikut terkoreksi hingga hari ini. Sedangkan disisi lain imbas dari pemanasan global. Segala sesuatu ada saling hubungannya, krisis ekonomi Amerika kemudian menjadi krisis global yang berpengaruh pada sektor riil ditingkat lokal.

Centrum kekuatan akumulasi modal kapitalis berada di negara ini, Amerika merupakan pasar ekspor terbesar di dunia termasuk pasar ekspor Indonesia. Angka-angka ekspor nonmigas Indonesia ke AS selama ini yang tercatat di Badan Pusat Statistik dan diolah kembali oleh Departemen Perdagangan. Sekilas terlihat betapa produk Indonesia sangat bergantung pada pasar Amerika. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS meningkat dari 7,17 miliar dollar AS pada 2002 menjadi 10,68 miliar dollar AS pada 2006 atau meningkat 11,74 persen. Selama Januari-Agustus 2007, ekspor ke AS sudah mencapai US\$ 7,48 miliar AS atau meningkat 5,14 persen dari periode yang sama 2006. Peran ekspor ke AS terhadap total ekspor nonmigas Indonesia mencapai 12,45 persen, setingkat di bawah ekspor ke Jepang yang mencapai 15,36 persen. Akibat orientasi ekspor produk yang terlalu bertumpu pada pasar Amerika mengakibatkan hantaman telak bagi Indonesia karena daya beli konsumsi Amerika akan merosot akibat krisis finansial yang menerpanya. Bagi Indonesia, krisis ini akan memiliki dampak yang saling terkait di berbagai sektor. Pada akhirnya, semua ini akan memperlambat pertumbuhan.

INDONESIA TERSERET KRISIS KEUANGAN AS.

Dalam sebulan terakhir krisis keuangan di Amerika meledak kembali dipicu oleh kebangkrutan lembaga keuangan dunia Lehman Brothers setelah tidak mampu membayar tagihan sebesar US\$ 60 milyar yang berasal dari subprime mortgages. Otoritas keuangan di Amerika tidak bersedia mengulurkan tangan menyelamatkan bank investasi yang telah berumur lebih dari 150 tahun ini sehingga kematian Lehman Brother tak bisa dihindari. Selain Lehman, masih ada

Morgan Stanley dan AIG yang juga sedang mengibahkan bantuan untuk menyelamatkan keuangannya. Untuk kedua perusahaan ini kelihatannya Pemerintah Amerika akan berusaha menyelamatkan karena khawatir dampak yang lebih parah terhadap akan terjadi jika kedua perusahaan tersebut dibiarkan kolaps. Mengingat skalanya yang besar kejatuhan lembaga keuangan Amerika Serikat, baik yang ditolong maupun yang dibiarkan mati, membawa dampak besar kepada sistem keuangan dunia. Tentu saja dampak pertama dialami oleh lembaga keuangan yang selama ini menjadi kreditur dari *investment* bank yang sedang kolaps tersebut, seperti beberapa bank besar di Inggris dan Jepang. Namun yang paling parah terkena tentu saja masyarakat Amerika Serikat.

Tingkat Konsumsi AS Melemah

Dana yang tersedot untuk menyelamatkan lembaga keuangan tersebut menyebabkan makin sulitnya masyarakat AS mendapatkan dana baik untuk kepentingan konsumsi maupun bagi dunia usaha. Suku bunga yang menjadi naik dan inflasi yang meningkat menyebabkan makin berat beban yang ditanggung rumah tangga Amerika Serikat sehingga terpaksa mereka menurunkan tingkat konsumsinya. Demikian juga bagi dunia usaha, makin sulitnya mendapatkan dana untuk modal kerja maupun investasi, menyebabkan makin tingginya biaya yang harus dipikul sehingga makin memperlemah daya saing mereka terhadap produk impor sehingga kemudian banyak pabrik yang mengurangi aktivitasnya, bahkan ikut terseret menjadi bangkrut. Melemahnya tingkat konsumsi negara sebesar Amerika tentu saja berdampak ke negara lain. Konsumsi tekstil warga AS yang menyusut mengakibatkan turunnya impor produk tekstil. Bagi Indonesia ini akan berpengaruh besar karena sekitar 43% ekspor tekstil ditujukan ke Amerika. Tentu saja bukan hanya Indonesia yang terkena dampak melemahnya ekonomi AS, secara umum perekonomian dunia memang sudah mulai menurun semenjak mulai merbaknya akan krisis *subprime mortgages* ini pada

tahun 2007 yang lalu. Krisis ini telah menyeret jatuhnya nilai US dollar sehingga para investor lari ke pasar komoditi sehingga berbagai harga komoditi primer meroket harganya. Kenaikan harga ini mempercepat terjadinya kelesuan ekonomi karena inflasi segera melambung yang menyebabkan terpotongnya daya beli masyarakat di Amerika Serikat dan negara maju.

Pada puncaknya harga komoditi kemudian tidak bisa meningkat lagi karena permintaan sudah menurun jauh. Semenjak puncaknya harga minyak bumi pada bulan Juli 2008 yang pernah mencapai harga US\$ 147 per barel, maka harga minyak bumi kemudian melorot sampai level dibawah US\$ 100 per barel, dan mencapai harga terendah dalam 17 bulan terakhir yaitu mencapai US\$ 91 per barel.

Dampak Krisis Ekonomi Global terhadap Indonesia

Kekisruhan di sektor keuangan dan fluktuasi harga komoditi akan banyak berpengaruh terhadap kinerja dan ketahanan ekonomi Indonesia. Tidak bisa dipungkiri dalam dua tahun terakhir harga komoditi primer yang tinggi Indonesia mendapat keuntungan dalam situasi ini. Ekspor Indonesia yang banyak bertumpu kepada komoditi primer mengalami booming, sehingga ekspor melejit padahal ekonomi dunia mulai melesu. Walaupun Indonesia juga terimbas krisis akibat harga minyak bumi yang meroket, yaitu dengan naiknya harga BBM yang pada gilirannya menyebabkan inflasi yang tinggi, namun ternyata dampak dari tingginya harga komoditi berdampak seimbang terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan harga beras, minyak goreng dan bahan pangan menyebabkan daya beli masyarakat menurun, namun kenaikan berbagai barang komoditi ekspor utama Indonesia seperti CPO, karet, Batubara, pulp & paper, dan barang tambang lain telah menyebabkan kemakmuran beberapa kawasan yang menjadi produsen utama komoditas tersebut. Selanjutnya hal ini menggairahkan ekonomi secara regional dan mendorong meningkatnya konsumsi masyarakat.

Ditengah suku bunga yang mulai merayap naik, kredit konsumsi masih terus meningkat, penjualan mobil, sepeda motor dan rumah juga terus meningkat. Hal ini menunjukkan sebagian masyarakat yang diuntungkan oleh naiknya harga komoditi, kemudian membelanjakan uangnya untuk keperluan konsumsi. Pada gilirannya ekonomi bergerak dengan dorongan konsumsi masyarakat yang tetap tinggi. Hasilnya GDP Indonesia tahun 2008 diperkirakan lebih tinggi dari ramalan Bank dunia dan ADB yang hanya memprediksikan pertumbuhan ekonomi 6%, padahal sampai semester 1 2008, pertumbuhan ekonomi rata-rata sudah 6,3% atau sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2007, dan di atas pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya.

Investasi pun mulai bergerak kembali dimotori oleh agrobisnis, pertambangan, konstruksi dan menyebar ke sektor industri manufaktur. Namun bukan berarti Indonesia terbebas dari imbas krisis finansial global. Fluktuasi harga minyak menyebabkan nilai tukar berbagai mata uang dunia juga terus berubah. Ketika harga komoditi meningkat, asing memindahkan portofolio investasinya dari bursa saham di negara *emerging market* seperti Indonesia ke bursa komoditi, akibatnya terjadi *capital flight* dari dana asing sehingga US dollar kembali menguat. Sebaliknya ketika harga minyak melemah, USD kembali menguat, maka investor kembali berinvestasi dalam US dollar, sehingga memperlemah Rupiah. Akibat kenaikan harga komoditas dunia maka harga barang di Indonesia pun meningkat. Akibatnya inflasi juga meningkat.

Dengan tingkat inflasi yang tinggi, BI memperketat ekonomi dengan menaikkan suku bunga akibatnya Bank berlomba menaikkan suku bunga dan mulai membebani dunia usaha. Melihat perkembangan perang suku bunga akhir-akhir ini BI berusaha meredamnya dengan meminta bank tidak berlomba menawarkan suku bunga yang tinggi untuk mengumpulkan dana masyarakat, karena akan berakhir dengan kerugian dari perbankan sendiri. Misalnya pada tanggal 24 September 2008, Bank Indonesia

telah mendesak bank nasional untuk sepakat membatasi suku bunga hanya sampai 13% dan mencegah perang suku bunga antar bank besar terus berlanjut. Sejauh ini Pemerintah dan BI masih dapat berperan mencegah perang suku bunga lebih lanjut, karena saat ini fundamental ekonomi Indonesia yang ditunjang oleh ekspor dan konsumsi rumah tangga masih baik.

Namun kedua faktor tersebut terus tergerus kemampuannya karena makin lemahnya daya beli masyarakat yang terus digerogoti inflasi. Sementara harga komoditi ekspor juga telah mencapai puncaknya sehingga kini cenderung menurun. Akibatnya tidak bisa lagi diharapkan pertumbuhan ekspor yang tinggi seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Dampak Krisis Ekonomi Global Terhadap Pertanian Indonesia

Krisis ekonomi di Amerika telah memberi pukulan langsung kepada petani Indonesia. Harga dua komoditas unggulan, minyak sawit dan karet, menukik tajam. Petani pun telah kehilangan pasar produk pertanian mereka di Amerika. Sedangkan dampak tidak langsung juga bisa terjadi, petani kita berpotensi kehilangan pasar di negara-negara yang menjadi partner Amerika seperti: Cina, India, Jepang, dan Eropa.

Tentu saja krisis ekonomi kali ini mau tak mau mengingatkan kita pada situasi 1998. Krisis ekonomi kala itu demikian besar dampak kerusakannya. Itu disebabkan titik episentrum gempa ekonomi terjadi waktu itu ada di dalam negeri kita sendiri dan di saat daya tahan ekonomi kita tidak kuat. Jadi berbeda sekali dengan krisis kali ini. Sumber kerusakan ada di luar negeri dan Indonesia sudah punya pengalaman sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Meski begitu, negeri kita tidak bisa menahan sama sekali gelombang tsunami akibat gempa ekonomi di Amerika. Harus kita terima kenyataan bahwa di tahun-tahun ke depan laju pertumbuhan ekonomi kita akan mengalami perlambatan. Kita berharap angkanya tidak sampai negatif. Dampak krisis ekonomi Amerika tidak hanya menimpa negara kita saja. Hampir seluruh di dunia ter-

imbis. Tapi, kenyataan ini tidak bisa menjadi apologi pemerintah untuk tidak berpikir kreatif dan bertindak cermat-cepat. Untuk bisa keluar dari krisis, kita sangat bergantung pada efektivitas usaha pemerintah meredam krisis. Pemerintah juga perlu bekerjasama dengan negera-negara lain, secara bilateral maupun multilateral, untuk menyelamatkan ekonomi riil rakyat, khususnya petani, bukan hanya menyelamatkan pasar modal, sistem perbankan dan kondisi keuangan negara.

Kita berharap langkah-langkah yang diambil pemerintah efektif menekan derajat kerusakan ekonomi yang terjadi, baik intensitas dan lama terjadinya. Menurut prediksi sebagian ekonom, AS membutuhkan waktu untuk *recovery* antara 1-2 tahun. Berapa waktu yang dibutuhkan pemerintah kita? Jika pemerintah kita lambat bergerak dan gagal memberi solusi yang tepat dalam mengantisipasi efek krisis AS yang terjadi selama 1-2 ke depan, pertumbuhan ekonomi kita akan terus merosot, pengangguran meningkat, neraca perdagangan menurun, dan harga-harga termasuk harga energi dan pangan akan anjlok. Sementara, melemahnya pertumbuhan ekonomi global akan mengakibatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian kita, seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh dan rempah-rempah, akan berkurang. Payahnya, sudah jumlah permintaan yang berkurang, harganya juga terus merosot.

Saat ini telah terjadi penurunan ekspor produk-produk pangan dan pertanian Indonesia ke Amerika. Indonesia khawatir permintaan pasar pangan Cina dan India seiring menurunnya tingkat ekonomi kedua negara itu akibat ekspor mereka ke Amerika. Hal tersebut akan berakibat buruk kepada para petani kita, khususnya para petani yang mengandalkan pasar ekspor. Pemerintah perlu mengantisipasi akibat turunannya, bukan hanya penurunan pertumbuhan sektor pertanian secara makro, tapi juga dampak riil berupa bertambahnya pengangguran dan petani miskin.

Krisis ekonomi dunia juga mengakibatkan larinya modal asing dan lemahnya nilai

tukar rupiah. Sektor pertanian sebenarnya bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan devisa yang dibutuhkan negara kita untuk menstabilkan gejolak moneter. Syaratnya, pemerintah harus mendorong ekspor hasil pertanian dan mengurangi impor produk-produk pertanian. Surplus perdagangan internasional yang dihasilkan, tentunya akan berdampak bagus bagi ekonomi petani, apalagi jika kontrol terhadap perubahan nilai tukar rupiah oleh otoritas moneter bisa bersahabat dengan sektor pertanian.

Jika penambahan ekspor sulit dilakukan, masih ada variabel konsumsi dalam negeri dan belanja pemerintah bisa dipakai untuk menyelamatkan para petani. Konsumsi dalam negeri terhadap produk-produk domestik harus ditingkatkan. Harus ada insentif untuk itu. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan konsumsi pangan dalam negeri karena harga produk pertanian lebih murah, khususnya untuk konsumsi protein dan lemak. Sehingga, krisis ekonomi kali ini tidak akan menaikkan secara tajam jumlah anak-anak penderita gizi buruk.

Sementara itu belanja pemerintah harus ditingkatkan dan distribusinya dipercepat untuk memperbaiki infrastruktur di pedesaan dan pertanian. Perbaiki jalan-jalan desa dan irigasi. Proyek ini akan membuka lapangan kerja di tingkat desa. Jika ada pekerjaan, rakyat desa memiliki pendapatan. Daya beli mereka itulah yang akan menggerakkan ekonomi di pedesaan. Ada kebutuhan konsumsi pangan dan ada keperluan akan barang-barang hasil industri.

Pemerintah harus mengusahakan ekspor pertaniannya tidak sampai menurun drastis. Kalau perlu pakai sistem barter seperti yang pernah dilakukan dimasa Pemerintahan Presiden Habibie. Masih lebih bagus terjadi pertukaran barang, daripada tidak ada perdagangan sama sekali. Artinya, roda ekonomi masih berjalan. Problem perdagangan internasional sekarang memang likuiditas.

Jadi, sistem barter bisa kita coba sebagai sebuah solusi situasional. Kita bisa menjual minyak kelapa sawit ke Rusia dengan imbalan

pupuk yang dibutuhkan petani. Kita jual karet ke Cina dengan imbalan mesin-mesin pertanian. Pemerintah juga bisa membantu petani sawit dengan menghidupkan lagi ide konversi energi ke bio diesel. Harga minyak kelapa sawit yang terjun bebas saat ini tentu akan terkoreksi dengan program konversi energi itu.

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

Sebagaimana diketahui, krisis saat ini cukup istimewa karena pusat gempunya terletak di pusat syaraf kapitalisme global Wall Street, Amerika disaat ekonomi dunia sudah begitu terglobalisasi dan berhubungan dengan erat. Ini berbeda dari krisis-krisis sebelumnya yang berpusat di ekonomi pinggiran (Asia, Rusia, Brasil, Argentina) maupun berlangsung ketika dunia belum begitu terglobalisasi (krisis tahun 1970an) Meskipun sejumlah komentator menilainya sebagai awal dari kejatuhan AS sebagai adidaya ekonomi, perkembangan krisis sejauh ini justru menunjukkan betapa ekonomi-ekonomi di dunia begitu bergantung pada negeri termaju tersebut. Dugaan awal bahwa krisis ini akan mengangkat Tiongkok dan India menggantikan AS pun juga masih berupa tanda tanya besar, yang jawabannya bergantung pada kemampuan negeri-negeri raksasa tersebut dalam melancarkan kebijakan yang mengurangi efek negatif kemerosotan ekonomi Amerika maupun Uni Eropa.

Serupa dengan itu, negeri-negeri Selatan lainnya yang lebih kecil, seperti Indonesia, dihadapkan oleh persoalan tentang bagaimana menghadapi tsunami finansial yang dilepaskan oleh Wall Street, yang terwujud antara lain dalam bentuk kredit seret di dalam maupun luar negeri dan ancaman penarikan modal oleh investor luar negeri. Di luar ini masih terdapat lagi ancaman yang lebih besar berupa menyusutnya mata pencaharian negeri Selatan yang sebagian besar bersandar pada pemasukan ekspor barang konsumsi ke negeri-negeri maju yang kini sedang menurun daya belinya. Seiring mendalam dan meluasnya krisis, negeri-negeri Selatan pun dihadapkan oleh pertanyaan seperti

mampukah mereka membentengi diri dengan berbagai instrumen pertahanan ekonomi, atau bilamana hal tersebut dinilai tidak layak, dengan menumpuk persediaan dan bahkan meminjam uang dari luar negeri (IMF) untuk bertahan dan memperbaiki kerusakan yang akan diakibatkan oleh bencana tersebut?

Belajar dari Krisis Asia 1997

Untuk mendapatkan gambaran tentang apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh negeri Selatan terkait hal ini, diskusi akan dimulai dengan melakukan kilas balik ke Krisis Asia 1997. Krisis besar terakhir, yang oleh Chossudovsky disebut 'gladi resik dari apa yang akan terjadi' tentu memiliki banyak perbedaan dengan krisis saat ini, namun masih cukup relevan untuk dijadikan referensi tentang kebijakan-kebijakan untuk meresponnya. Walaupun Dana Moneter Internasional (IMF) menganjurkan resep kebijakan yang standar, terdapat berbagai variasi kebijakan di antara negeri-negeri Asia Timur dan, terutama, Tenggara.

Negeri-negeri yang mematuhi anjuran IMF seperti Thailand dan terutama Indonesia merupakan yang menderita kerusakan paling parah, sedangkan Malaysia, yang dengan tegas menolak anjuran IMF dan melaksanakan kontrol kapital, adalah yang paling sehat ke luar dari krisis, walaupun perlu dicatat bahwa fundamental ekonomi Malaysia dan perbankannya juga dinilai sangat kuat bila dibandingkan dengan negeri lainnya yang bermasalah.

Kontrol kapital

Kebijakan kontrol kapital Malaysia ini senada dengan anjuran Paul Krugman dalam artikelnya yang membuka kompilasi NEFOS.org *Menyelamatkan Asia; Saatnya Bertindak Radikal*, mengkritik cara penanganan IMF, terutama kebijakan suku bunga tingginya yang justru akan mempersulit pemulihan kembali bahkan menghancurkan ekonomi negeri-negeri yang bermasalah. Kontrol kapital, yakni kebijakan-kebijakan yang mengontrol ketat pertukaran mata uang dan arus modal, memberikan keleluasaan untuk

mempertahankan suku bunga yang rendah. Kebijakan ini juga memiliki logika yang berbeda dari resep IMF karena terang-terangan menegaskan kedaulatan ekonomi suatu negara di hadapan kekuatan finansial asing; modal finansial spekulatif 'dipaksa' untuk membatasi pergerakannya, bukannya sekedar 'dibujuk' untuk menetap dengan insentif suku bunga tinggi.

Penjajahan Neoliberal

Mengapa IMF melakukan kesalahan-kesalahan tersebut? Bila Krugman melemparkan kritiknya dengan lebih berhati-hati, pemimpin revolusioner Amerika Latin, Fidel Castro dengan gamblang menjelaskan bahwa 'kesalahan-kesalahan' tersebut merupakan penerapan dari dogma pasar bebas yang sesungguhnya merupakan agenda penindasan negeri-negeri Dunia Ketiga oleh negeri-negeri maju dan perusahaan transnasional. Dalam pidatonya di depan pemimpin negeri-negeri G77 tak lama setelah krisis Asia, ia dengan lantang menyerukan pembubarhan IMF, yang baru-baru ini disebutnya juga sebagai 'tangan internasional Departemen Bendahara Amerika'. Menurutnya, institusi tersebut telah mendesak kebijakan ekonomi yang menciptakan bencana sosial di negeri-negeri Selatan. Anjuran IMF agar negeri-negeri Selatan memperkuat cadangan devisa hanya akan menguntungkan Amerika karena pembengkakan cadangan devisa dalam bentuk dolar sama saja dengan memberi pinjaman terhadap pemerintah Amerika. Padahal cadangan devisa yang tinggi tidak cukup kuat untuk mempertahankan ekonomi dari serangan spekulator, sebagaimana dibuktikan oleh krisis Asia. Sementara beberapa anjuran bahkan desakan IMF yang mencegah pembelanjaan cadangan devisa untuk mendanai kebutuhan sosial seperti kesehatan dan pendidikan adalah suatu kejahatan yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan yang membunuh jutaan rakyat Dunia Ketiga.

Utang Dunia Ketiga kepada negeri-negeri maju, jelas Castro, sebenarnya telah dilunasi bila mengingat suku bunganya yang dinaikkan dengan semena-mena, dan menurunnya harga-

harga barang komoditas dasar akibat perdagangan yang setimpang. Perdagangan dunia juga menjadi salah satu dari bentuk penjajahan terhadap Dunia Ketiga di mana liberalisasi komersial dipaksakan kepada negeri Selatan, sementara negeri-negeri maju tetap mempertahankan tembok tarifnya.

Teknologi di tangan negeri-negeri maju bukan dipergunakan untuk kebutuhan manusia, melainkan untuk keuntungan semata, sehingga jutaan rakyat Dunia Ketiga tidak memiliki akses terhadap obat-obatan dan bibit pertanian yang dibutuhkan. Sementara sistem kepemilikan tradisional yang begitu penting bagi negeri Selatan maupun transfer pengetahuan tidak diakui oleh legislasi paten.

Dalam tiga tahun, penjajahan neoliberal ini telah membunuh manusia yang jumlahnya sebanding dengan korban Perang Dunia II yang berlangsung selama enam tahun. Dunia dapat diglobalisasi di bawah kekuasaan neoliberalisme, tapi tidaklah mungkin menguasai milyaran lebih orang yang lapar akan roti dan haus akan keadilan. "Untuk melawan penjajahan neoliberal ini, Castro menyerukan agar Dunia Ketiga harus bersatu dan mempererat kerjasama.

Melepas Ketergantungan dari IMF

Kini, gerakan antar-bangsa yang menentang penjajahan neoliberal dan paling radikal bisa dikatakan terdapat di Amerika Latin, dengan Venezuela di bawah pimpinan Chavez sebagai salah satu negeri yang mempelopori pembangunan kerjasama regional yang adil. Walau demikian, di belahan bumi lainnya termasuk Asia Tenggara terdapat juga negara-negara yang berupaya melepas ketergantungan dari dominasi neoliberal. Walden Bello dalam artikelnya yang dimuat dalam kompilasi kali ini, menyuguhkan sapuan lebar tentang sentimen penolakan terhadap IMF yang meluas di antara negeri-negeri Asia Timur. Secara khusus ia mencatat strategi defensif negeri-negeri Asia Timur berupa penimbunan cadangan devisa dan pelunasan utang terhadap IMF, yang berhasil mengancam institusi arogan itu ke jurang

kebangkrutan. Sebagaimana ditegaskan oleh Eric Toussaint dalam sebuah wawancara yang juga dimuat dalam kompilasi ini, keberlangsungan IMF dimungkinkan oleh pembayaran bunga oleh negeri-negeri yang berutang.

Bello (2007) menekankan bahwa reformasi “arsitektur finansial global” yang berulang kali dikumandangkan, sejauh ini tidak memberikan pengaruh berarti dalam mengurangi dampak negatif perputaran kapital global. Kekuasaan kapital finansial yang spekulatif justru semakin menjadi-jadi dan mengancam dunia ke arah krisis yang lebih besar dan menghancurkan. Krisis itu kini telah hadir.

Chossudovsky menjelaskan bahwa dana talangan (*bailout*) yang dilakukan oleh pemerintah Amerika bukannya akan menghentikan krisis, melainkan justru memperparahnya. Karena sesungguhnya dana talangan tersebut didapatkan pemerintah Amerika dari bank-bank yang menerima dana talangan itu. Obama menjadi tumpuan harapan rakyat Amerika untuk membawa mereka keluar dari krisis, tidak akan membawa perubahan positif yang berarti.

Kesimpulan ini ditariknya sejak jauh hari tepatnya, sejak diumumkannya tim transisi Obama dengan melihat latar belakang orang-orang yang akan ditempatkan Obama dalam jabatan-jabatan penting yang mengatur ekonomi, khususnya Sekretaris Departemen Bendahara, seperti Tim Geithner (akhirnya dipilih Obama untuk posisi tersebut) dan Summers.

Chossudovsky menunjukkan bahwa individu-individu ini menunjukkan rekam jejak yang setia pada agenda neoliberal Washington Consensus, dan dalam prakteknya telah menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap hajat hidup rakyat Dunia Ketiga dan lingkungan hidup.

Orang-orang pilihan Obama itu, terutama Summers dan Geithner yang saat itu menjabat posisi penting dalam Departemen Bendahara Amerika, juga sangat berperan mendorong kebijakan-kebijakan IMF yang menghancurkan dalam Krisis Asia yang lalu. Dengan tak adanya perubahan personil, Chossudovsky meyakini bahwa administrasi Obama akan menunjukkan

‘kontinuitas’ yang dinahkodai ‘jaringan anak-anak lama’ yang terdiri dari pejabat dan penasihat di Departemen Bendahara, Cadangan Federal, IMF, Bank Dunia, Think Tanks di Washington, yang secara permanen bekerjasama dengan pengusaha finansial terdepan di Wall Street.

Dua artikel terakhir oleh pakar ekonomi politik Panitch dan Gindin mendiskusikan tentang apa yang harus digunakan untuk melawan neo-liberalisme dalam konteks krisis ekonomi saat ini. Panitch secara khusus menjabarkan tentang terbukanya kesempatan baru untuk melancarkan tuntutan yang pernah populer di kalangan Kiri Baru (*New Left*) pada tahun 1970an, yakni nasionalisasi institusi finansial dan perbankan. Tuntutan ‘bank sebagai kegunaan publik’ ini, menurutnya, akan membuka ruang bagi demokratisasi dan transformasi seluruh sistem finansial bukannya sekedar penerapan regulasi baru untuk melayani kebutuhan sosial rakyat. Melengkapi ide ini, Gindin membahas tentang kemungkinan-kemungkinan alternatif yang bisa diangkat untuk memperkuat posisi kelas pekerja di hadapan kapital. Tiga tuntutan utama itu adalah (1) kesehatan universal, (2) sistem pensiun publik, dan (3) pembangunan infrastruktur publik untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu ia juga mengangkat tuntutan seperti perumahan publik dan pengurangan jam kerja serta pembangunan proyek-proyek lingkungan hidup. Tuntutan-tuntutan mendesak ini akan kemudian membenturkan kelas pekerja kepada kontradiksi bahwa perekonomian, khususnya perbankan, dikuasai oleh swasta. Oleh karenanya tuntutan yang lebih ‘besar’ seperti nasionalisasi bank akan lebih diperkuat olehnya dan perlu diperjuangkan secara simultan, bukannya bertahap.

Artikel Gindin dan Panitch ditujukan kepada gerakan rakyat di Amerika Utara, walau demikian beberapa konsepnya seperti menuntut pelayanan publik untuk memperkuat posisi tawar kelas pekerja dihadapan kapital swasta cukup relevan dengan kondisi di negeri-negeri lainnya, termasuk negeri Selatan seperti Indonesia. Sebagai contoh, memperjuangkan layanan

kesehatan universal berarti juga mengupayakan berkurangnya ketergantungan kelas buruh di Indonesia terhadap tunjangan kesehatan yang diberikan oleh pengusaha, dengan demikian memperkuat daya tawar buruh dihadapan pengusaha.

Gindin menunjukkan bahwa kontradiksi yang dihadapi gerakan saat ini adalah jurang antara gagasan yang bagus dan kapasitas untuk melaksanakannya. Gerakan progresif di Amerika Utara dan banyak negeri lainnya masih terpinggirkan dan belum mampu mempengaruhi kebijakan yang ada. Oleh karena itu 'alternatif' yang paling utama adalah bagaimana menghimpun beragam kekuatan untuk membangun sebuah kapasitas politik untuk menyaingi lawan dalam menyebarkan gagasan-gagasan ini, terutama ketika gagasan lawan sedang terdiskreditkan seperti saat ini.

Kompilasi ditutup oleh Woods yang menceritakan tentang nasionalisasi Banco de Venezuela oleh pemerintah Chavez. Ia membandingkan nasionalisasi bank di Venezuela dengan nasionalisasi bank di Inggris dan membantah pendapat para pembela pasar bebas bahwa pengelolaan publik cenderung tidak efisien. Ia menunjukkan bahwa ambruknya bank-bank swasta di AS dan Inggris secara terang-terangan menunjukkan bahwa pengelolaan swasta tidak lebih baik, bahkan sering kali jauh lebih buruk. Agak berbeda dengan tulisan lainnya dalam kompilasi, Woods banyak menggunakan jargon Marxis dan generalisasi seperti "Kaum Marxis menyambut tiap langkah menuju nasionalisasi." Hal yang sesungguhnya tentu tidak sesederhana ini, dan langkah-langkah nasionalisasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kesiapan pelaku nasionalisasi, potensi perlawanan pihak yang dinasionalisasi, maupun keuntungan yang akan diperoleh dari langkah nasionalisasi tersebut, sehingga nasionalisasi tanpa pandang bulu justru berpotensi menyebabkan kemunduran. Tentunya, hal ini perlu menjadi pembahasan tersendiri.

Otoritas moneter maupun pemerintah tampaknya tidak boleh sedikit pun mengabaikan

proses berlangsungnya krisis keuangan global saat ini. Kewaspadaan harus tetap terjaga terutama menyangkut stabilitas nilai tukar dan fluktuasi harga-harga komoditas dunia. Sekali saja kebijakan yang dijalankan meleset, akibatnya perekonomian akan terperangkap dalam kesulitan ekonomi yang besar. Lihat saja sejumlah negara industri maju mengalami kemerosotan ekonomi yang dalam. Ekonomi Cina diprediksi akan merosot dari 12% menjadi 9-10%, Rusia dari 8% ke 5%, bahkan Amerika Serikat mengalami kontraksi ekonomi hingga mencapai 2 - 3%. Sebagian negara-negara kelompok G7 yang selama ini menjadi aktor utama ekonomi dunia lebih awal menyatakan resesi ekonomi sudah menerpa mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Perekonomian dunia yang lesu membuat Indonesia pun tidak dapat menghindar. Ekspor terus merosot, iklim investasi portofolio menyusut hingga 50%, pertumbuhan ekonomi diproyeksi akan tumbuh hanya dalam kisaran 3,5 - 4,5%, defisit neraca pembayaran terutama bersumber dari neraca modal dan jasa akan meningkat, terjadi reduksi yang cukup besar di bidang ketenagakerjaan. Semua itu berdampak pada beban yang cukup berat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Memang kondisi krisis ekonomi saat ini bukanlah akhir dari penantian panjang dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Kapal besar perekonomian nasional masih cukup kuat dan stabil. Cadangan devisa masih cukup untuk membiayai keperluan impor dan pembayaran utang luar negeri, sektor keuangan dan perbankan masih cukup solid dengan likuiditas yang terjaga. Kebutuhan produk makanan dapat disediakan meskipun sejumlah komoditas, seperti daging sapi, kacang kedelai, susu cair, dan tepung terigu masih diimpor. Namun, dapat dipastikan penerimaan negara sektor pajak berkurang, menyusul menurunnya kapasitas pajak dan basis pajak nasional. Iklim investasi di sektor riil khususnya dari *Foreign Direct Investment* (FDI) atau penanaman modal asing. Apakah kita menyerah dengan krisis? Tentu tidak. Ekonomi nasional harus dapat bertahan di tengah krisis. Sejumlah kebijakan ekonomi

perlu lebih proaktif. Yang diharapkan adalah kebijakan ekonomi yang mampu membuat kehidupan ekonomi rakyat dapat bertahan sekaligus mencari dan memanfaatkan peluang untuk bertumbuh. Apa yang dilakukan bulan pertama tahun ini terkesan dapat membawa harapan baru.

Kebijakan untuk kembali menurunkan beberapa jenis BBM sudah tepat. Namun, bukankah harga BBM jenis tertentu dapat lebih rendah dari harga yang sudah direncanakan? Turunnya harga minyak mentah ke level 40 dolar Amerika per barel. Sesungguhnya rakyat berpotensi menerima harga BBM yang benar-benar dapat membangkitkan ekonomi dari keterpurukan. Sementara itu, dapatkah penurunan tingkat suku bunga BI rate dari 9,25 basis poin menjadi 8,75 basis poin atau berkurang 0,50 basis poin membawa dampak yang segar bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga mereka? Inilah momentum yang ditunggu-tunggu agar aliran dana perbankan dapat menyuntikkan vitamin dengan dosis tinggi bagi dunia usaha. Sedangkan untuk menopang tekanan krisis ekonomi yang menerpa masyarakat saat ini, pemerintah juga akan mengeluarkan stimulus fiskal berupa penyediaan anggaran Rp 50 triliun.

REFERENSI :

- Leman. 1998. *Metode Pengembangan Sistem Informasi*. Jakarta: PT Alex Media Kompetindo.
- Martin, MP. 1991. *Analysis And Design Of Business Information Systems*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Scott, G.M. 2002. *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*, Ahli Bahasa Achmad Nashir Budiman. Jakarta. Ptgrafindo Persada.

PENUTUP

Upaya untuk penanggulangan krisis ekonomi global bangsa Indonesia harus lebih teliti dalam menerima produk-produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri, apalagi selama ini orang-orang lebih mengunggulkan produk luar negeri hal ini tidak menambah perekonomian di Indonesia melainkan kemerosotan ekonomi. Ketergantungan Indonesia terhadap hutang IMF membuat makin banyak permasalahan dan sulit untuk menutupi hutang-hutang yang lain. Bangsa Indonesia lebih memperhatikan usaha-usaha kecil yang ada agar pengangguran lebih bisa berkurang. Saran untuk pemerintah Indonesia adalah (1) Diharapkan Indonesia tidak selalu tergantung ekspor kepada Amerika, melainkan kepada negara-negara lain; (2) Rakyat Indonesia selalu mencintai produk-produk dalam negeri dan jangan tergantung kepada produk-produk luar negeri; (3) Bangsa Indonesia diharapkan tidak tergantung kepada IMF; (4) Lebih menghemat sumber daya alam yang ada.